

# Lembar Berita Elektronik FPP: Februari 2013



Forest  
Peoples  
Programme

## Lembar Berita Elektronik FPP: Februari 2013

Dokumen ini memiliki “akses terbuka”, Anda bebas untuk membuat kopi dari situs kami. Anda juga diijinkan untuk mereproduksi teks di sini dengan mencantumkan rujukan/ucapan terima kasih kepada FPP.

### Berlangganan Lembar Berita Elektronik FPP

Jika Anda belum melakukannya, Anda dapat berlangganan Lembar Berita Elektronik FPP dengan mengklik di [sini](#) atau dengan mengirim surel ke [gemma@forestpeoples.org](mailto:gemma@forestpeoples.org). Lembar Berita ini dikeluarkan dua bulan sekali; Anda juga mungkin akan sering menerima tambahan berita atau laporan lainnya. Anda dapat menghentikan langganan setiap saat dengan mengklik tautan berhenti berlangganan yang ada di tiap pengiriman.



#### Forest Peoples Programme

1c Fosseway Business Centre, Stratford Road

Moreton-in-Marsh

GL56 9NQ

United Kingdom

Tel: +44 (0)1608 652893

[info@forestpeoples.org](mailto:info@forestpeoples.org)

[www.forestpeoples.org](http://www.forestpeoples.org)

© Forest Peoples Programme

Foto sampul: Anggota masyarakat adat Baka sedang mendokumentasikan di mana mereka menangkap ikan dengan menggunakan GPS, untuk dicantumkan pada peta pemanfaatan sumber daya hutan © John Nelson

Sahabat-sahabat tercinta,

Saat seseorang mengatakan bahwa suatu solusi gagal karena 'kurangnya kemauan politik', saya secara otomatis langsung bertanya pada diri sendiri: kemauan politik siapa dan kepentingan-kepentingan apa yang mendorong hal sebaliknya?

Riset lapangan baru dari Kosta Rika menunjukkan bahwa pemerintah telah berpuluh-puluh tahun mendiamkan dan mengijinkan pengambilalihan tanah-tanah masyarakat adat secara besar-besaran dan kini tidak mampu melakukan sesuatu ketika para pemimpin adat diancam dan dibunuh. Apakah hal ini terjadi hanya karena 'kurangnya kemauan politik' atau karena pemerintah-pemerintah yang melanjutkan pemerintahan sebelumnya memiliki kaitan-kaitan yang erat dengan elit pemilik tanah dan karenanya menutup mata atas diskriminasi, kekerasan dan kebencian yang terjadi pada masalah sumber-sumber daya ini, daripada melawan perampasan tanah secara ilegal ini?

Pemerintah Peru kini mengijinkan pembangunan jalan-jalan baru dan infrastruktur lainnya dilaksanakan melintasi tanah-tanah dan hutan-hutan adat agar terhubung dengan Brasil, yang sedemikian mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat Isconahua yang terisolasi. Merekatinggal di atas tanah yang sama yang disediakan pemerintah untuk melindungi mereka. Di saat yang sama pemerintah Peru amat menyadari bahwa keputusan yang diambil akan mengorbankan hak-hak masyarakat adat tersebut namun tetap memutuskan untuk mendukung kepentingan usaha yang terus menekan pembukaan jalur menuju kawasan Amazon untuk hal yang mereka anggap sebagai pembangunan. Sama halnya, adalah prioritas terhadap penambangan dan kurangnya perlindungan hukum bagi hak-hak adat yang telah mendorong diambilnya keputusan pengadilan yang mengerikan di Guyana.

Dominasi yang sama terjadi pada proses politik oleh prioritas jangka pendek kepentingan sektoral yang sempit yang menghalangi negosiasi-negosiasi internasional untuk menghadapi perubahan iklim. Pertemuan terakhir di Doha menunjukkan bahwa 'kurangnya kemauan politik' ini (dominasi kepentingan tertentu yang berupaya melakukan hal sebaliknya) telah menghasilkan kelumpuhan virtual. Seluruh masa depan kita, tidak hanya masa depan masyarakat yang bergantung pada hutan, terancam oleh kurangnya aksi.

Karenanya, ketika Pemerintah Inggris mengumumkan sebuah kebijakan bantuan yang baru untuk memberantas penyebab deforestasi lewat kerja secara langung dengan korporasi, tidaklah mengejutkan jika kita dapatkan gambaran bahwa mereka tengah menaruh serigala di antara unggas. Ya, perubahan dalam tindak tanduk korporasi haruslah menjadi bagian dari setiap solusi, namun untuk mewujudkan ini kita juga membutuhkan masyarakat sipil yang waspada dan penggalangan masyarakat yang bergantung pada hutan untuk meminta pertanggungjawaban kalangan usaha yang telah 'direformasi' ini. Bagaimanapun juga, begitulah tujuan dari demokrasi.

Sebagai sebuah organisasi hak asasi manusia, adalah tugas kita untuk mendukung solusi-solusi yang menghormati hak-hak manusia. Namun sebagai analis dan advokat, adalah juga tugas kita untuk membongkar kepentingan politik dan ekonomi yang berada di balik semua tindakan penyalahgunaan. Kita melakukan hal ini dengan membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Jadi, di Republik Demokratik Kongo, di mana kepentingan korporasi kini tengah berupaya mencari keuntungan dari pasar-pasar sukarela karbon hutan yang baru, kami membongkar kurangnya kepatuhan mereka pada kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat yang bergantung pada hutan. Dengan semangat yang sama, kami tengah bekerja sama dengan masyarakat adat Baka di Kamerun untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan akan masa depan hutan-hutan mereka. Sementara itu di tingkat internasional kami bekerja sama dengan masyarakat-masyarakat adat yang mendesak agar pengetahuan tradisional mereka juga harus dihormati dan diterapkan untuk mempertahankan ekologi planet kita yang amat berharga ini.

Tidak kalah pentingnya, adalah kehormatan dan kebahagiaan saya menyambut Joji Cariño sebagai Direktur Forest Peoples Programme yang baru. Joji, yang telah mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, akan mulai bertugas di bulan April dan saya menantikan saat untuk melayani di bawah kepemimpinannya.

Marcus Colchester, Direktur

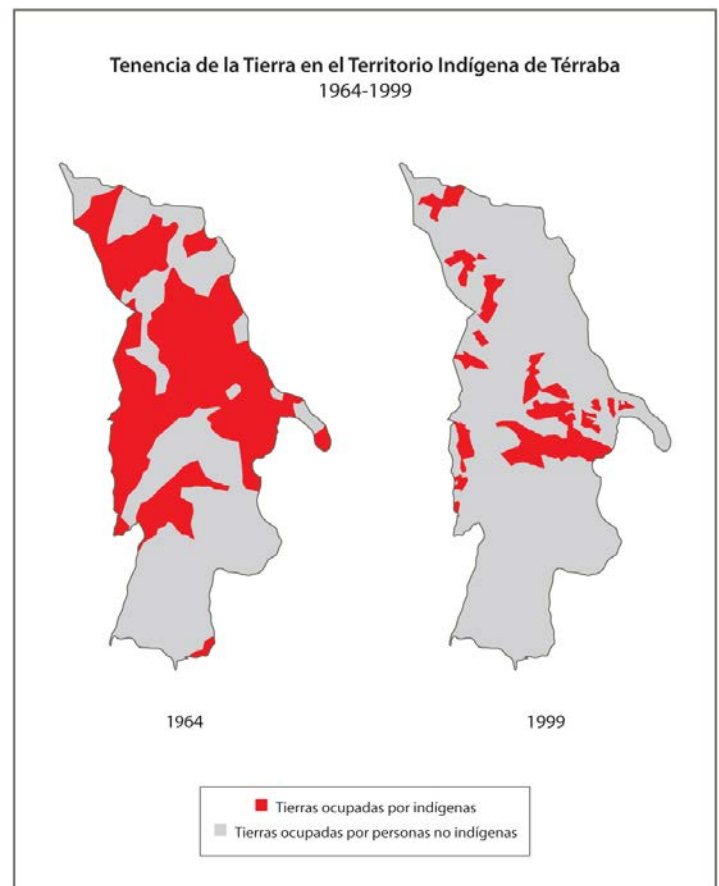
## Pengumuman tentang Direktur Baru

FPP dengan senang hati mengumumkan, bahwa Joji Cariño akan menduduki posisi Direktur Forest Peoples Programme terhitung sejak tanggal 15 Mei 2013, dalam koordinasi dengan Komite Eksekutif dan anggota Dewan FPP. Joji, yang telah dikenal baik oleh banyak dari Anda sekalian, adalah perempuan adat asal Filipina yang sangat dihormati yang telah memiliki banyak pengalaman dalam hak asasi manusia masyarakat adat di tingkat komunitas, nasional dan internasional, dan merupakan seorang pendukung kebijakan dan praktisi yang aktif dalam 30 tahun terakhir. Joji diakui di tingkat internasional sebagai seorang pakar dalam keragaman budaya dan biologis, pengetahuan tradisional dan hak-hak masyarakat adat, dan standar-standar internasional tentang air dan energi, bendungan besar dan alternatif-alternatifnya, kehutanan, industri ekstraktif dan tanggung gugat korporasi. Beliau adalah koordinator Kelompok Kerja *International Indigenous Forum on Biodiversity* (IIFB) (Forum Adat Internasional tentang Keanekaragaman Hayati) tentang Indikator dan merupakan mitra pengorganisir untuk *Indigenous Peoples Major Group* di Komisi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan. Kami senang sekali beliau akan bergabung dengan tim FPP.

Marcus Colchester, Direktur pendiri FPP tidak akan meninggalkan tim FPP. Setelah lebih dari 20 tahun membaktikan diri sebagai direktur, Marcus akan meninggalkan posisi direktur untuk memfokuskan diri pada kerja lapangan dan advokasi internasional FPP. Beliau akan tetap berada dalam tim sebagai Penasihat Kebijakan Senior. Di bawah kepemimpinan, arahan-arahan dan wawasan-wawasan Marcus, FPP telah berkembang dari sebuah tim kecil para aktivis HAM yang berdedikasi menjadi sebuah organisasi HAM internasional yang terpadang yang beranggotakan 32 staf yang mendukung kerja akar rumput bersama lebih dari 30 mitra lokal di 20 negara di Afrika, Asia, Amerika Selatan dan Amerika Tengah.

## 1. Kosta Rika: Masyarakat adat mengalami serangan kekerasan karena menuntut pengakuan hak mereka atas tanah

Ada 8 kelompok masyarakat adat di Kosta Rika dengan total populasi sebanyak 104.143 jiwa, yang mencakup kurang lebih 2,4 persen dari populasi negara tersebut. Banyak dari masyarakat adat ini tinggal di 24 wilayah yang diakui secara hukum dan disebut sebagai wilayah adat, serta di atas lahan-lahan yang secara tradisional mereka huni, namun saat ini tidak diakui atau diberi hak. Sebagian besar wilayah adat diduduki secara masif dan ilegal oleh masyarakat non-adat, termasuk dalam beberapa kasus ekstrem di mana 98% dari lahan tersebut dihuni atau dikuasai oleh masyarakat nonadat.



Kepemilikan tanah di Kawasan Adat Térraba 1964-1999 (bagian berwarna merah menunjukkan tanah yang diduduki masyarakat adat dan bagian berwarna putih menunjukkan tanah yang diduduki masyarakat bukan adat) © FPP

Pengakuan atas wilayah adat berawal pada akhir tahun 1930-an dan pendudukan (okupasi) ilegal pada wilayah ini telah didokumentasikan setidaknya sejak tahun 1960-an, ketika laporan pejabat resmi membenarkan bahwa hal tersebut merupakan situasi yang serius dan genting. Namun, disayangkan tidak ada langkah konkret yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Tahun 1977, Kosta Rika mengadopsi *Hukum Adat* yang menetapkan bahwa wilayah-wilayah ini “tidak dapat diambil alih dan tidak dapat diceraikan, tidak dapat dipindahtangankan dan eksklusif untuk komunitas adat...”. Namun demikian, tindakan dan pengabaian pemerintah Kosta Rika bertentangan dengan hukum domestik serta kewajiban internasionalnya karena secara implisit menyetujui aksi pendudukan ilegal ini. Tindakan dan pengabaian ini telah menimbulkan akibat yang serius bagi masyarakat adat, yang tidak dapat sepenuhnya menggunakan dan menikmati hak kepemilikan mereka serta hak-hak terkait lainnya.

Penelitian mencatat bahwa hal di atas adalah masalah nasional, di mana 6.087 masyarakat non-adat secara ilegal menduduki 43% (142.386,77 hektar) wilayah yang secara legal diperuntukkan bagi masyarakat adat. Hanya di 2 dari 24 wilayah adat tersebut masyarakat adat menguasai sepenuhnya wilayah yang diperuntukkan untuk mereka; di lima wilayah lainnya (20,75%) penguasaan mereka berkisar antara 75%-90%; di empat wilayah lainnya (16,66%) penguasaan mereka berkisar 58%-60%; dan di enam wilayah lainnya (25%) penguasaan mereka berkisar antara 32%-50%. Di ketujuh wilayah sisanya (29,16%), masyarakat hanya menguasai kurang dari seperempat wilayah yang diperuntukkan bagi mereka, dan di tiga dari wilayah-wilayah ini penguasaan mereka bahkan kurang dari 10%.

Setahun belakangan ini, masyarakat adat dan para pemimpin mereka telah mengalami serangan hanya karena mereka menuntut perlindungan atas hak tanah mereka. Sejak bulan Februari 2012, kebencian dan ketegangan rasial terhadap masyarakat adat telah menimbulkan percobaan pembunuhan atas 2 pemuka adat (Pablo Sibas Sibas dari masyarakat Teribe dan Sergio Rojas, pemuka adat Bribri dari Salitre) dan menyebabkan lebih dari 20 orang terluka parah. Percobaan pembunuhan atas Sergio Rojas sebagian diakibatkan karena hasutan Dewan Kota Buenos Aires yang mem-*persona-non-grata*-kan Sergio (*persona non grata* adalah sebuah istilah yang berarti orang yang tidak diakui atau diterima). Baru-baru ini, yaitu pada tanggal 6 Januari 2013, tiga orang masyarakat Bribri dari Salitre yang tidak bersenjata dan tidak mengancam, yang terlibat dalam pemulihan lahan yang diduduki secara ilegal di wilayah mereka, diserang pada tengah malam oleh penyerang bersenjata yang berasal dari masyarakat non-adat. Wilbert Ortiz ditembak kakinya, Marcos Obando Delgado mengalami luka yang dalam akibat tusukan parang dan dua jarinya terluka parah, dan Mainor Ortiz Delgado juga ditusuk dengan parang serta disiksa dengan batang besi panas yang meninggalkan luka permanen pada dadanya. Tidak diragukan lagi, penyerangan ini menimbulkan trauma

fisik dan psikologi yang parah.

Akibat insiden ini, Lembaga Ombudsman Kosta Rika dan kantor negara PBB mengeluarkan [sebuah siaran pers bersama](#)<sup>1</sup> mengutuk aksi kekerasan yang terjadi dan mendesak negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin integritas fisik dan kehidupan semua orang yang terlibat dalam konflik. Mereka menyerukan agar “situasi ini diselesaikan lewat jalan damai, dalam kerangka hukum dan hak-hak masyarakat adat atas wilayah mereka terjamin.”

Kekerasan dan tindak kejahatan terhadap masyarakat adat dan pemuka-pemukanya ini belum pernah terjadi dalam sejarah Kosta Rika dan merupakan tanda-tanda pengabaian pemerintah untuk menyelesaikan masalah hak atas tanah ini, meskipun adanya tuntutan dari masyarakat adat dan rekomendasi dari organisasi HAM internasional, seperti UN CERD dan Pelapor Khusus Hak Masyarakat Adat.

## 2. Hutan Ngoyla-Mintom di Kamerun: Perspektif Masyarakat Adat Baka

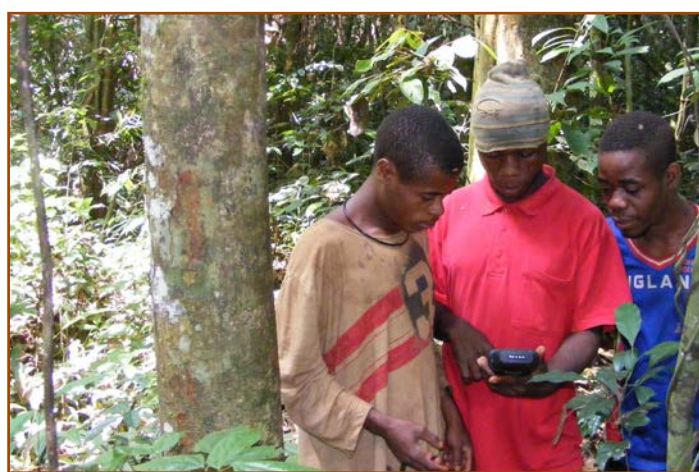
Ngoyla-Mintom adalah sebuah kawasan berhutan yang terletak di pegunungan, yang namanya diambil dari nama dua distrik di dua daerah di Kamerun, yaitu Ngoyla di daerah timur dan Mintom di daerah selatan. Hutan hujan ini terkenal karena menjadi target kepentingan berbagai aktor, termasuk pemerintah Kamerun, perusahaan swasta dan komunitas internasional. Di bulan-bulan terakhir ini Ngoyla-Mintom mendapatkan reputasi sebagai blok hutan yang sebelumnya tidak tersentuh eksploitasi, yang dengan cepat telah membangkitkan minat Kementerian Kehutanan Kamerun yang tertarik untuk melelang bagian-bagian hutan tersebut kepada perusahaan penebangan swasta.

Meskipun demikian, hutan ini juga membawa harapan besar akan pelestarian alam karena nilai strategisnya sebagai koridor biologis bagi hewan-hewan TRIDOM (*Tri-National of Dja Odzala and Minkebe*), yaitu sebuah hutan dataran rendah yang luas yang membentang melintasi wilayah Kamerun, Republik Kongo dan Gabon. Lebih dari lima tahun terakhir ini hutan tersebut telah dipertimbangkan untuk dijadikan proyek-proyek penyerapan karbon.

<sup>1</sup> [http://www.pnud.or.cr/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1510:preocupacion-por-los-hechos-de-violencia-ocurridos-en-el-territorio-indigena-de-salitre&catid=49:reduccion-la-pobreza-desigualdad-y-exclusi&Itemid=101](http://www.pnud.or.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=1510:preocupacion-por-los-hechos-de-violencia-ocurridos-en-el-territorio-indigena-de-salitre&catid=49:reduccion-la-pobreza-desigualdad-y-exclusi&Itemid=101) (hanya tersedia dalam bahasa Spanyol)

Hutan ini menghadapi tantangan yang luas dan merupakan salah satu sumber potensial berbagai konflik: masyarakat adat, seperti masyarakat Baka dan komunitas-komunitas penghuni hutan lainnya, sering kali tidak dilibatkan dalam diskusi-diskusi terkait hutan, yang telah mereka lestarikan secara efektif dan berkelanjutan selama beribu-ribu tahun.

Untuk membantu masyarakat adat Baka dan komunitas Bantu yang menghuni kawasan ini, Forest Peoples Programme, [OKANI](#) dan [CED](#) telah mengadakan serangkaian konsultasi mengenai sejumlah isu, misalnya tentang pemetaan penggunaan sumber daya hutan di hutan Ngoyla-Mintom.



Anggota masyarakat adat Baka tengah mendokumentasikan batas-batas konsesi penebangan ikan dengan menggunakan GPS, untuk dicantumkan pada peta pemanfaatan sumber daya hutan © John Nelson

Untuk mencapai tujuan ini, dua pertemuan meja bundar telah diselenggarakan di Mintom dan Lomié, untuk mempertemukan aktor-aktor utama yang berkepentingan dengan hutan Ngoyla-Mintom. Perlu dicatat bahwa pejabat administratif setempat amat menghargai kesempatan-kesempatan untuk saling bertukar informasi ini, yang telah menarik banyak orang penting di Mintom, di mana Pejabat Sub-Divisi dan Walikota juga menyempatkan diri untuk hadir, dan di Lomié yang dihadiri oleh Deputi Manajer Distrik mewakili Pejabat Sub-Divisi yang berhalangan hadir, serta Walikota Ngoyla.

### Persepektif Masyarakat Adat Baka:

Masyarakat adat Baka yang menghadiri kedua pertemuan di Mintom dan Lomié juga menghargai perhatian kalangan berwenang dan kualitas kontribusi mereka. Masyarakat adat Baka meminta partisipasi pejabat administratif dalam setiap tahapan proses yang terkait dengan kegiatan yang berlangsung di dalam hutan, seperti saat presentasi peta-peta yang mereka buat dan

selama pelaksanaan pemetaan hutan. Ini akan membuat berbagai aktor dapat menghargai hubungan antara masyarakat-masyarakat ini dengan lingkungan mereka, dan dengan hutan mereka. Sebagaimana dinyatakan oleh Ndoyi, seorang anggota masyarakat adat Baka dari Desa Lelen: **‘Segala hal harus dimulai dari rumah; jika Anda perlu pengobatan, mulailah lakukan itu di rumah. Seorang pemimpin harus membuat dirinya didengar seluruh pihak yang terlibat untuk mendapatkan kompromi, memberikan nasihat, mendidik dan meningkatkan kesadaran’.**

Masyarakat adat Baka juga meminta agar peta-peta yang mereka hasilkan dipresentasikan di Yaounde karena di sanalah keputusan-keputusan utama dan penting tentang hutan diambil.



Masyarakat adat Baka ingin melindungi pohon-pohon Moabi di hutan-hutan mereka, yang menjadi sasaran para pembalok © John Nelson

Selain itu, masyarakat adat Baka juga meminta adanya peningkatan kapasitas para pemimpin lokal terpilih (misalnya para penasihat dan deputi) tentang masalah-masalah yang mempengaruhi masyarakat adat Baka.

Lebih lanjut lagi, masyarakat adat Baka meminta institusionalisasi sebuah mekanisme untuk dialog antara lembaga yang bekerja spesifik dengan isu-isu

yang mempengaruhi mereka dengan otoritas lokal yang relevan.

Langkah-langkah ke depan yang mungkin bagi masyarakat adat Baka adalah:

- Menginformasikan dinas-dinas administratif dan otoritas lokal tentang proses REDD dan masyarakat adat, dan melengkapinya (membantu) mereka untuk menangani isu-isu ini
- Mensosialisasikan peta-peta yang dihasilkan
- Memetakan komunitas-komunitas yang tinggal bersebelahan dengan kawasan proyek
- Melanjutkan dialog tentang hutan Ngoyla-Mintom dalam hubungannya dengan tantangan-tantangan yang erat dengannya: misalnya, penambangan dan pembangunan infrastruktur transportasi (seperti jalan kereta api Mbalam-Kribi)
- Membuat salinan-salinan skala besar dari peta-peta lokal yang dihasilkan dan mengedepankan mereka dalam diskusi-diskusi tentang hutan mendatang.

### 3. Hak-hak masyarakat adat dilanggar dan tanah adat di Guyana terancam oleh operasi penambangan

Di awal tahun 2013, masyarakat-masyarakat adat di Guyana semakin khawatir dengan terus berlangsungnya dan meningkatnya pengabaian hak-hak mereka yang sah oleh para penambang dan lembaga pemerintah, serta pelanggaran hak yang didukung pengadilan pada dua kasus baru-baru ini. Tahun 2012 lobi penambang secara terbuka menyerang hak-hak masyarakat adat atas tanah dalam surat kabar Guyana dan berjanji akan menentang pengakuan tanah-tanah adat. Sementara itu, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengatur sektor pertambangan tampaknya mempercepat pengeluaran izin-izin penambangan dan konsesi di atas tanah-tanah adat Amerindian, meskipun tanah-tanah tersebut menjadi subyek tindakan-tindakan hukum di pengadilan yang berupaya mendapatkan pengakuan atas hak kepemilikan tradisional dan/atau permohonan masyarakat desa untuk hak atas tanah dan perpanjangan hak atas tanah yang belum tuntas.

#### *Tanah masyarakat Akawaio dinodai dan hak-hak mereka diinjak-injak*

Peristiwa-peristiwa dan keputusan-keputusan pengadilan baru-baru ini tentang konflik pertambangan di atas

tanah Desa Akawaio di Mazaruni Tengah dan Utara merupakan contoh-contoh tragis dari pelanggaran yang nyata terhadap hak-hak masyarakat adat oleh operasi penambangan. Menghadapi hal tersebut, para pemimpin adat dan komunitas Akawaio berdiri membela hak-hak mereka dan menantang operasi penambangan yang merambah tanah dan perairan adat mereka. Setahun terakhir ini, Desa Kako di Distrik Mazaruni Utara telah dipaksa untuk memasuki pertarungan di pengadilan akibat aduan seorang penambang ketika masyarakat desa menolaknya memasuki Sungai Kako untuk melakukan penambangan. Kepala desa (Toshao) juga disebut telah menghina pengadilan dan kini tengah menghadapi ancaman pidana penjara setelah masyarakat yang dipimpinnya melakukan aksi damai langsung untuk mencegah sang penambang memasuki tanah mereka, sebuah aksi yang melanggar keputusan pengadilan yang mengizinkan sang penambang melanjutkan kegiatannya tanpa hambatan.



Tempat Sungai Mazaruni dan Sungai Kako bertemu: air Sungai Mazaruni berwarna coklat dan mengalami pencemaran akibat aksi penambangan, sementara air Sungai Kako, saat ini, masih bersih.

Masyarakat Kako bertekad mencegah konsesi penambangan di daerah mereka, agar Sungai Kako tetap bersih sehingga mereka dapat terus menggunakannya sebagai sumber air minum dan tempat menangkap ikan © Oda Almas

“Sudah diketahui bahwa kita adalah pelindung tanah-tanah ini. Tanah kita adalah hidup kita!” ucap Toshao Mario Hastings saat dia berbicara tentang pentingnya tanah masyarakatnya bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Bulan Juli 2011, Dewan Desa dan masyarakat Desa Kako pertama kalinya mengetahui bahwa lembaga regulator, yaitu Komisi Geologi dan Pertambangan Guyana (*Guyana Geology and Mines Commission/GGMC*), telah mengeluarkan sebuah ‘izin eksplorasi’ kepada penambang tersebut. Dalam interaksi pertamanya masyarakat desa menolak dengan keras kegiatan penambangan mana pun yang dilakukan di daerah hulu sungai atau di atas tanah adat mereka karena kegiatan tersebut akan mencemarkan

sumber air mereka dan merusak tanah adat mereka. Mereka tetap bertahan pada pendapat mereka bahwa hal-hal tersebut akan berdampak pada sumber penghidupan mereka karena daerah-daerah tersebut adalah daerah tempat mereka menangkap ikan, berburu dan bertani. Belum lagi adanya rumah-rumah di lokasi tersebut yang telah ada sejak dahulu, jauh sebelum Guyana merdeka dari Inggris.



Jika penambangan diijinkan di Sungai Kako, masyarakat Kako akan sepenuhnya tergantung pada air hujan yang ditampung dalam tangki-tangki untuk kebutuhan air minum mereka © Oda Almas

Dalam dua kesempatan di bulan Juli dan Agustus 2012, penambang tersebut berupaya masuk namun masyarakat desa dengan teguh tetap menolaknya. Sementara itu, sang Toshao mencoba bertemu dengan lembaga terkait untuk menyoroti keprihatinan mereka namun tanpa hasil. Tanggal 18 September 2012, penambang tersebut mengajukan perintah pengadilan yang dikabulkan pengadilan dan lalu mendukung sang Toshao. Tanggal 5 Oktober 2012, selagi sang Toshao pergi menghadiri sebuah pertemuan dewan distrik di tempat lain, tiba-tiba dia terbawa ke sebuah situasi permusuhan dengan sang penambang yang memang dihalangi masyarakat untuk masuk ke sungai. Sejak kejadian tersebut sang penambang mengajukan sebuah pemberitahuan penghinaan atas keputusan yang telah

dikabulkan pengadilan dan menuntut sang Toshao dari Desa Kako untuk “dimasukkan ke Penjara Georgetown atas ketidakpatuhannya yang disengaja dan kurang ajar” dan bersikeras menyebutkan bahwa sang Toshao adalah “pemrakarsa dan dalang” dari resistensi masyarakat Akawaio dari Desa Kako.

Sama halnya dengan kasus di banyak desa Amerindian di Guyana, tanah milik Kako yang ada tidak sesuai sepenuhnya dengan tanah-tanah adat yang mereka manfaatkan dan huni turun temurun; termasuk tanah-tanah yang membentang ke arah barat sampai lembah sungai Kako. Tanah-tanah adat ini membentuk daerah sumber daya tradisional yang dimanfaatkan masyarakat desa Kako dan dimiliki bersama berdasarkan hukum adat dengan desa-desa Akawaio yang bertetangga, yaitu Kamarang, Jawalla dan Phillipai, yang sama-sama memanfaatkan tanah-tanah ini dengan masyarakat desa Kako untuk berburu, menangkap ikan dan mengumpulkan hasil kebun/hutan. Bulan Nopember 2012, sang Toshao mendapatkan sebuah salinan peta konsesi penambangan dan terkejut mendapati bahwa sebagian besar tanah tradisional mereka kini dipenuhi oleh blok-blok eksplorasi dan penambangan, yang dalam beberapa kasus satu orang penambang mendapat izin atas beberapa blok.



Sebuah keluarga dalam perjalanan pulang di Sungai Kako. Mereka tinggal dekat sekali dengan konsesi-konsesi penambangan © Oda Almas

Baru-baru ini, dalam apa yang mungkin terlihat sebagai pukulan terhadap perjuangan masyarakat Kako, seorang hakim di Pengadilan Tinggi telah [memerintahkan](#)<sup>2</sup> bahwa Dewan Desa Isseneru di Mazaruni Tengah tidak lagi berwenang mengatur para penambang di atas tanah milik mereka atas dasar bahwa para penambang

2 Bergabunglah dengan Rilis Berita Bersama FPP dan Rainforest Foundation US *Keputusan pengadilan Guyana melanggar hak-hak masyarakat adat*, 28 Januari 2013: [http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/01/International\\_pressrelease\\_Isseneruvillage\\_courtruling\\_Jan%202013.pdf](http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/01/International_pressrelease_Isseneruvillage_courtruling_Jan%202013.pdf)

tersebut adalah pemegang konsesi sebelum Desa Isseneru mendapatkan hak milik atas tanah mereka. Hal ini terjadi salah satunya juga disebabkan oleh UU Amerindian yang tidak dapat mendukung kewenangan tersebut karena UU tersebut diberlakukan setelah izin konsesi diberikan.

Sementara itu, tanggal 26 Januari 2013 penambang di pusat konflik tanah di Kako di atas memindahkan peralatannya ke sungai dan tanggal 3 Februari seorang penambang lainnya memasuki sungai untuk memancangkan rambu klaim hak penambangan. Sekali lagi, sang penambang tidak memberitahukan hal ini kepada masyarakat desa dan juga tidak meminta persetujuan sebelumnya dari mereka.

Kasus pengadilan terhadap pemimpin Desa Kako terus berlanjut dengan kemungkinan vonis akan diputuskan bulan ini: apakah interpretasi perundang-undangan akan menegakkan hak-hak masyarakat adat? Dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini yang diadakan lewat kerjasama dengan Dewan Desa Isseneru, sang Toshao dari Desa Kako dengan berterus terang menyatakan bahwa: Ini adalah bukti bahwa UU Amerindian, yang terus menerus dikatakan pemerintah kita sebagai UU terbaik di dunia, adalah dusta belaka. Saya menuntut agar UU ini segera direvisi sehingga hak-hak kita terjamin.”

#### Informasi lebih lanjut:

- Komunikasi urgen FPP dan APA mengenai situasi komunitas adat Akawaio di Isseneru dan Kako di Guyana kepada Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples*) (hanya tersedia dalam bahasa Inggris): <http://www.forestpeoples.org/topics/un-human-rights-system/publication/2013/urgent-communication-situations-akawaio-indigenous-co>
- Bergabunglah dengan Rilis Berita Bersama FPP dan Rainforest Foundation US *Keputusan pengadilan Guyana melanggar hak-hak masyarakat adat*, 28 Januari 2013: [http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/01/International\\_pressrelease\\_Isseneruvillage\\_courtruling\\_Jan%202013.pdf](http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/01/International_pressrelease_Isseneruvillage_courtruling_Jan%202013.pdf)

## 4. ARTIKEL TAMU: Proyek jalan raya lintas negara yang dicanangkan pemerintah Peru mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat Isconahua

**Robert Guimaraes Vásquez  
(Kelompok Regional untuk  
Pemantauan Megaprojek di Ucayali  
di Peru, GRMMU)**

A usulan proyek jalan raya lintas negara pemerintah Peru untuk menghubungkan kota Pucallpa (kawasan Ucayali) di wilayah Amazon Peru dengan kota Cruzeiro do Sul (negara bagian Acre) di Brasil mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat Isconahua yang tinggal dalam “isolasi sukarela”. Di bulan Nopember 2012, pemerintah Peru, lewat *PROVIAS NACIONAL* (sebuah lembaga di Kementerian Transportasi dan Komunikasi), memberikan lampu hijau bagi pelaksanaan proyek tersebut, yaitu *IIRSA Centro*, yang sejauh ini telah berlanjut memasuki studi kelayakan tahap dua.



Sebuah keluarga tradisional Shipibo-Konibo yang tinggal di DAS Abujao (Ucayali) © Robert Guimaraes Vásquez

Daerah ini dicirikan oleh keanekaragaman hayati yang tinggi dan merupakan tempat tinggal bagi lebih dari 13.000 masyarakat adat, termasuk masyarakat adat Shipibos, masyarakat adat Ashanincas, *rivereños* (masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai) dan sekelompok masyarakat yang tinggal dalam “isolasi sukarela” yang disebut masyarakat ISCONAHUA.

Masyarakat Isconahua memiliki kerentanan yang amat tinggi karena sistem kekebalan tubuh mereka tidak mampu melindungi mereka dari penyakit yang mungkin terpapar pada mereka jika mereka mengadakan kontak dengan orang luar.<sup>3</sup>

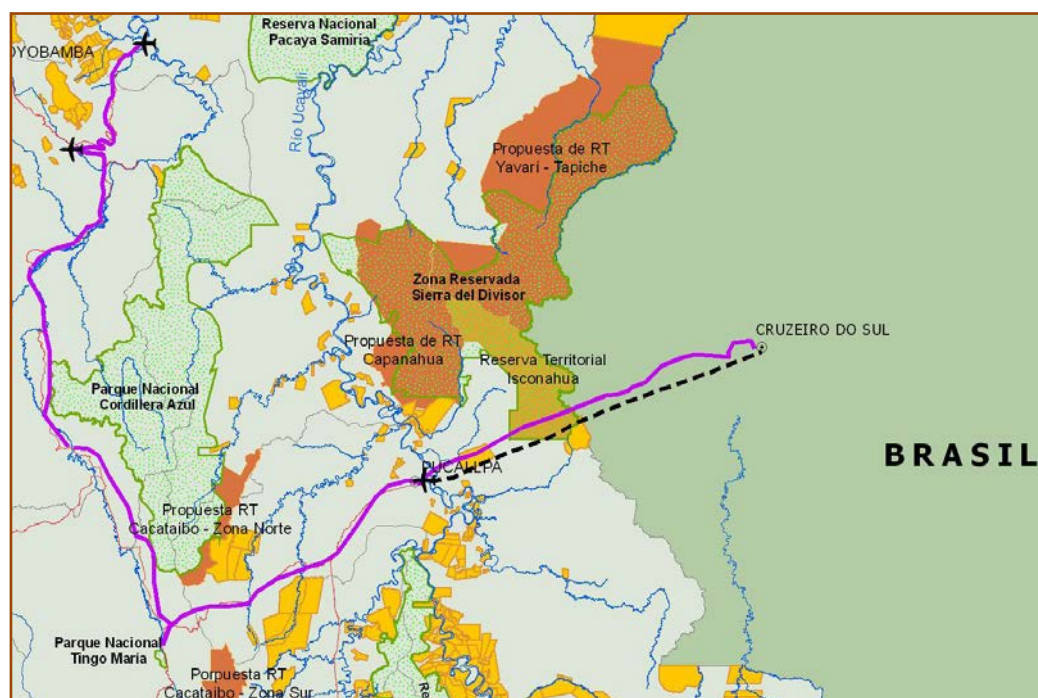
Saat ini, belum ada jalan dan batas-batas jalan raya di tanah adat Isconahua, sehingga hubungan apapun dengan 'dunia luar' akan menjadi hal yang benar-benar baru. Usulan proyek IIRSA ini karenanya akan membahayakan kehidupan masyarakat adat Isconahua dan berpotensi meningkatkan aksi pembalakan liar, kolonisasi, penjualan narkoba dan penambangan liar yang memang sudah ada di daerah tersebut.<sup>4</sup>

### Kewajiban Internasional Pemerintah Peru

Menurut perundang-undangan dan hukum keputusan hakim (*case law*) sistem *Inter-American*, para Pemerintah Negara, termasuk Peru, berkewajiban mendapatkan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD) masyarakat adat yang terkena dampak keputusan atau tindakan yang bisa mempengaruhi hak-hak dan wilayah mereka, termasuk keputusan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Jelas sekali bahwa, karena masyarakat adat Isconahuas tidak berhubungan dengan dunia luar, mereka tidak memberikan persetujuan mereka terhadap proyek jalan raya tersebut. Mengingat kerentanan mereka yang teramat tinggi ini, negara Peru

telah memberlakukan sebuah undang-undang (UU 28736, 2006<sup>5</sup>) yang menetapkan daerah-daerah suaka dimana masyarakat terisolasi tinggal sebagai 'kelompok yang tidak boleh diganggu (*off-limits*)'. Bahwa pemerintah Peru bahkan mempertimbangkan untuk membuka jalur jalan raya melintasi daerah-daerah suaka bagi masyarakat terisolasi ini menimbulkan pertanyaan akan komitmen mereka untuk memenuhi kewajiban hukum yang dimandatkan perundang-undangan domestik dan internasional.

Proyek jalan raya penghubung mana pun akan membahayakan integritas Wilayah Suaka Isconahua (*Isconahua Territorial Reserve*), dan Suaka Alam *Sierra del Divisor*, yaitu sebuah kawasan lindung yang ditetapkan oleh Pemerintah Peru, dan beresiko menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang serius atas hak-hak masyarakat adat dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat Isconahua. Situasi ini diperburuk oleh tindakan lembaga pemerintah lainnya, yaitu *PROINVERSIÓN*, yang mempromosikan proyek Jalan Kereta Api Lintas Benua Atlantik-Pasifik (*Atlantic-Pacific Transcontinental Railroad* (Peru-Brasil) atau FETAB), yang berhimpitan dengan jalur jalan raya lintas negara tersebut. Proyek ini juga akan membawa dampak yang teramat merugikan terhadap kehidupan komunitas lokal dan kelompok-kelompok yang tinggal dalam isolasi sukarela jika proyek ini terus berlanjut.



Usulan rute Jalan Raya IIRSA Centro © Instituto del Bien Común

Di bulan Oktober 2012, [Regional Group for Monitoring Megaprojects in Ucayali](#), sebuah koalisi organisasi masyarakat sipil, pemimpin adat, dan organisasi serta perwakilan masyarakat pribumi, mengeluarkan sebuah [pernyataan](#) menolak proyek ini.

Masih di tahun kemarin, beberapa organisasi adat bersama-sama mendesak pemerintah pusat, lewat pengiriman serangkaian [surat](#) kepada Kantor Presiden, untuk mengadopsi langkah-langkah administratif dan langkah-langkah hukum, di semua tingkatan, terhadap isu-isu yang mempengaruhi hak-hak masyarakat adat,

3 <http://www.inforegion.pe/medio-ambiente/145640/habria-indigenas-en-aislamiento-en-cercanias-de-carretera-propuesta-pucallpa-cruzeiro-do-sul/>

4 <http://www.americatv.com.pe/portal/programas/prensa/investigaci-n/cuarto-poder/multimedia/cuarto-poder-181112-sepa-por-qu-sierra-del-di>

5 Pasal 5, UU 28736, UU Perlindungan Masyarakat Adat atau masyarakat asli yang berada dalam status isolasi sukarela atau kontak awal (*initial contact*).

seperti dampak terhadap wilayah adat, sesuai dengan perundang-undangan dan hukum keputusan hakim (*case law*) sistem hak asasi *Inter-American*, Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization/ILO*) No. 169, Konstitusi Negara dan UU No. 29785, yaitu UU Hak atas Konsultasi Dini dengan Masyarakat Adat atau Masyarakat Pribumi, yang diakui dalam Konvensi ILO No. 169. Kegiatan apa pun yang dilakukan oleh pemerintah Peru harus mendapatkan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD) dari masyarakat terkait.



120 *Kóshibo* (pemimpin adat) masyarakat Shipibo-Konibo dari Ucayali, dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh federasi masyarakat asli Ucayali (*Federation of Native Communities of the Ucayali* atau FECONU), tanggal 15-16 Nopember, yang menyatakan penolakan mereka terhadap proyek tersebut. Mereka menyatakan bahwa di tahun 2013 Federasi ini akan mengadakan berbagai demonstrasi melawan pemerintah © Robert Guimaraes Vásquez

Kami menghimbau solidaritas internasional untuk menekan BNDES (Bank Pembangunan Brasil), CAF (Bank Pembangunan Amerika Latin) dan IDB (Bank Pembangunan Inter-American), dan para pendukung utama proyek IIRSA, untuk memohon penangguhan proyek tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan memastikan terpenuhinya hak-hak kolektif masyarakat adat yang terkena dampak megaprojek infrastruktur di kawasan Amazon Peru.

Untuk melakukan hal ini, mohon surati Luciano Coutinho di Kantor Presiden BNDES: [presidencia@bndes.gov.br](mailto:presidencia@bndes.gov.br)

Untuk informasi lebih lanjut tentang hal ini, silakan kunjungi: <http://www.forestpeoples.org/topics/responsible-finance>

Anda juga dapat mengunjungi blog *Regional Group for Monitoring Megaprojects in Ucayali* untuk ikut serta

dalam kampanye dan menunjukkan solidaritas: <http://megaprojectosucayali.blogspot.co.uk/>

### JIKA ANDA INGIN BEKERJA SAMA DENGAN CARA LAIN, SILAKAN HUBUNGI:

ROBERT GUIMARAES VÁSQUEZ  
 Koordinator Regional Group for Monitoring  
 Megaprojects in Ucayali  
 Escuela Amazónica de Derechos Humanos/EADH  
**Telepon:** 0051 (61) 961598323 **Skype:** rgv\_sh  
**Alamat:** Jr. Nueva Luz de Fátima 796 - Yarinacocha –  
 Pucallpa – Ucayali – Peru  
**Email:** [rgv\\_sh@yahoo.com](mailto:rgv_sh@yahoo.com), [psrgvasquez@gmail.com](mailto:psrgvasquez@gmail.com)



DAS Abujao (Ucayali). Aktifitas penambangan tak resmi mempercepat laju deforestasi dan pencemaran air yang menjadi sumber air minum masyarakat © Robert Guimaraes Vásquez

Kami mengucapkan terima kasih kepada (para) penulis atas kontribusi artikelnya untuk Lembar Berita Elektronik FPP. Pandangan yang dinyatakan dalam artikel ini tidak berarti mencerminkan pandangan Forest Peoples Programme.

## 5. Dari konsesi penebangan ke konsesi karbon: Apa bedanya bagi masyarakat di Republik Demokratik Kongo?

Tahun 2011, perusahaan swasta Kanada *Ecosystem Restorations Associates* (ERA) menandatangani sebuah kontrak dengan pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk pengelolaan bekas konsesi penebangan seluas hampir 300.000 hektar yang berbatasan dengan kawasan Lac Mai Ndombe bagian barat di Provinsi Bandundu<sup>6</sup>. Tujuan kesepakatan ini adalah mempersiapkan konsesi tersebut untuk penjualan karbon di pasar internasional. Hingga 50% dari wilayah konsesi ini tumpang tindih dengan kawasan adat masyarakat adat dan komunitas lokal. Kini ERA bermitra dengan Wildlife Works, sebuah perusahaan besar untuk pengelolaan dan pengembangan proyek REDD+.

Satu tahun sebelumnya sebuah perusahaan swasta lainnya, yaitu Jadora International LLC, menandatangani sebuah kontrak kemitraan dengan perusahaan penebangan SAFBOIS untuk mengimplementasikan sebuah proyek REDD di Isangi Territory di Provinsi Oriental. Proyek ini mencakup 239.728 hektar hutan primer yang terletak di atas 348.000 hektar konsesi penebangan SAFBOIS yang terletak di sebelah selatan Sungai Kongo. Wilayah konsesi ini tumpang tindih dengan kawasan adat 33 desa dan ribuan masyarakat adat; konsesi ini ditujukan untuk menghasilkan kredit karbon melalui pelestarian dan peningkatan hutan.

Setahun terakhir di kedua tempat ini, Forest Peoples Programme (FPP) dan mitra lokal kami [CEDEN](#)<sup>7</sup> telah mengadakan konsultasi dengan masyarakat untuk mengkaji dampak yang mungkin terjadi pada mereka akibat proyek-proyek ini, juga menyediakan informasi tentang program REDD milik Republik Demokratik Kongo dan pengaturan kelembagaan dan perjanjian dari proyek-proyek REDD di atas lahan mereka, serta mendukung keterlibatan masyarakat dalam proyek-proyek REDD tersebut. Temuan-temuan kami dari berbagai kunjungan terakhir ke kedua konsesi tersebut mengungkap bahwa banyak masyarakat tidak

mendapatkan informasi yang memadai tentang tujuan dari kedua proyek itu, serta waktu pelaksanaan dan rencana-rencana kerjanya.



Pertemuan masyarakat untuk mengkaji dampak yang mungkin timbul dari proyek-proyek REDD di Desa Yabongengo, yang terletak di dalam konsesi Jadora/SAFBOIS © Patrick Kipalu

Melalui keterlibatan langsung di lapangan, kami telah memastikan bahwa mayoritas masyarakat adat dan komunitas lokal telah terpinggirkan dari pembicaraan-pembicaraan tentang rancangan dan implementasi kedua proyek karbon tersebut. Sebagian besar masyarakat tidak mendapat informasi tentang manfaat-manfaat dari kontrak pengelolaan Jadora dan ERA yang menjadi hak mereka karena mereka tidak mengetahui isi kontrak pengelolaan yang pasti. Di saat Dokumen Rancangan Proyek dari kedua proyek tersebut menyarankan pemberian manfaat-manfaat bagi masyarakat sebagai imbalan atas pembatasan pemanfaatan mereka atas lahan adat mereka, ide-ide tentang bagaimana hal ini akan dilakukan justru dibawa dari luar, bukan berdasarkan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) (*free, prior, informed consent*/FPIC) masyarakat.

Oleh karena itu, ada *gap* informasi untuk komunitas yang perlu dipulihkan sesuai dengan kebijakan yang jelas dari negara tersebut untuk menghormati hak atas KBDD sebagaimana [dinyatakan](#)<sup>8</sup> oleh Sekretaris Jenderal Lingkungan Hidup yang merupakan perwakilan pribadi Menteri Lingkungan Hidup, dalam pertemuan akbar [Tropical Forest Dialogue](#)<sup>9</sup> yang diselenggarakan FPP bersama pemerintah di bulan Mei 2012.

Dalam kunjungan baru-baru ini ke kawasan tersebut,

<sup>6</sup> Untuk informasi lebih lanjut, lihat: <http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-related-initiatives/news/2012/04/carbon-concessions-democratic-republic-congo-drc-ne>

<sup>7</sup> Untuk informasi lebih lanjut tentang, silakan kunjungi: <http://www.forestpeoples.org/partners/cercle-pour-la-defense-de-l-environnement-ceden>

<sup>8</sup> Lihat sambutan pembukaan Menteri Lingkungan Hidup, Pelestarian Alam dan Pariwisata: <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/07/Secretary%20General%27s%20Speech%20-%20English.pdf>

<sup>9</sup> Untuk informasi lebih lanjut, lihat: <http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-related-initiatives/news/2012/07/drc-reaffirms-its-commitment-free-prior-and-informe>

FPP dan CEDEN menyatakan keprihatinan ini kepada pengelola kedua proyek karbon tersebut. Walaupun pengelola proyek Jadora telah mengakui bahwa masih banyak kerja yang harus dilakukan untuk memperbaiki rancangan dan implementasi proyek mereka, dan telah menyatakan permintaannya untuk berkolaborasi dengan FPP dan mitra-mitranya untuk mencapai tujuan ini. Dalam pertemuan terbaru yang diselenggarakan oleh FPP dengan para manajer proyek ERA, kesepakatan untuk kerjasama di lapangan telah tercapai untuk memastikan masyarakat memiliki akses kepada seluruh informasi dimana keterlibatan mereka dibutuhkan secara efektif dan untuk memaksimalkan manfaat yang akan mereka terima.



Kiri-kanan: Jacques Bolamba (Asisten Lapangan CEDEN), Noah Herland (Direktur Jadora di DRC), Patrick Kipalu (Koordinator Proyek, FPP) dan Jose Mokaria (Asisten Lapangan CEDEN) © FPP

Temuan-temuan tentang gap informasi ini menimbulkan beberapa pertanyaan tentang proses sertifikasi *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA) yang telah selesai di kedua konsesi. Untuk memenuhi standarinternasional, kedua proyek perlu melibatkan masyarakat berlandaskan KBDD mereka. Kami yakin bahwa kedua proyek akan terus mengalami perbaikan.

Kami menyambut baik keterbukaan proyek-proyek Jadora dan ERA untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, dan menantikan keterlibatan yang membangun dengan para manajer proyek berdasarkan prinsip saling menghormati untuk meningkatkan kolaborasi di antara para stakeholder/pemangku kepentingan. Kami akan mendukung kedua proyek untuk melibatkan masyarakat berdasarkan azas yang adil. FPP dan CEDEN akan terus bekerja sama dengan pengelola kedua proyek dan masyarakat yang terkena dampak untuk membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah ini, dan sementara ini kami akan terus berbagi informasi tentang kedua proyek kepada publik untuk memastikan bahwa program REDD milik Republik Demokratik Kongo tetap pada jalurnya.



Masyarakat desa di Kawasan Isangi © Patrick Kipalu

## 6. Pemerintah Inggris meminta komentar publik atas usulan-usulan untuk menghadapi deforestasi

Pemerintah Inggris mengundang publik untuk memberikan komentar atas usulan-usulan untuk menghadapi deforestasi dan emisi dari penggunaan lahan di negara-negara berkembang di bawah Dana Iklim International Inggris (*UK International Climate Fund/ICF*), yang dijalankan bersama oleh DECC<sup>10</sup>, DFID<sup>11</sup> dan DEFRA<sup>12</sup>. Makalahnya, yang bertajuk “*Forests and climate change: Discussion paper on a proposed new set of UK interventions to tackle deforestation*” (Hutan dan perubahan iklim: Makalah diskusi tentang usulan serangkaian intervensi baru Inggris untuk melawan deforestasi) tersedia di sini (hanya dalam bahasa Inggris):

<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130109092117/http://decc.gov.uk/assets/decc/11/tackling-climate-change/international-climate-change/7050-discussion-paper-deforestation-event.pdf>

### *The Usulan-usulan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam melawan deforestasi*

Makalah resmi tersebut menyatakan bahwa kini keputusan-keputusan konversi penggunaan lahan semakin banyak didorong oleh pasar dan operasi sektor swasta di negara-negara berkembang, sehingga pelibatan perusahaan dan pasar dipandang vital bagi upaya-upaya global untuk membendung hilangnya hutan.

10 Departemen Energi dan Perubahan Iklim

11 Departemen Pembangunan Internasional

12 Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Pedesaan

Di bawah model usaha Inggris, intervensi-intervensi yang dilakukan akan berupaya mendukung kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk “meningkatkan dan bermitra dengan investasi swasta untuk mengurangi deforestasi.” Kementerian pemerintah Inggris mengusulkan penggunaan pendanaan ICF untuk mempromosikan reformasi pasar dari sisi permintaan (*demand-side*) dan dari sisi pasokan (*supply-side*) untuk melawan deforestasi. Di bawah skema ini, Pemerintah Inggris akan membantu perusahaan agribisnis dan pemerintah-pemerintah nasional untuk memungkinkan dilakukannya investasi-investasi dan pembangunan-pembangunan yang berkelanjutan di “tempat-tempat terlantar dan kurang dimanfaatkan (*brownfield sites*)”. Dasar dari skema ini adalah untuk mengalihkan ekspansi agribisnis dari kawasan hutan alam yang masih alami ke lahan yang telah terdeforestasi dan dianggap ‘tidur’ dan tidak produktif. Pemerintah Inggris menyatakan bahwa upaya-upaya bilateral Inggris dapat diperluas untuk mencakup penyebab-penyebab deforestasi lainnya, termasuk pembangunan tambang dan infrastruktur.

Sumber daya dan “pendanaan katalis” untuk hutan dari ICF akan mendukung pemerintah negara-negara berkembang untuk “meningkatkan lingkungan usaha” dan memperbaiki “arsitektur yurisdiksi/hukum” untuk memungkinkan investasi sektor swasta dalam kegiatan-kegiatan yang “mengurangi emisi dari deforestasi”. Sementara itu, intervensi-intervensi Pemerintah Inggris akan berupaya untuk meningkatkan nilai hutan yang ada di kawasan-kawasan hijau dengan mendukung “pengelolaan hutan berbasis masyarakat, *agroforestry*, cara pemanenan berkelanjutan, energi biomassa, restorasi hutan dan usaha perkebunan yang dilakukan dengan praktik-praktik terbaik.”

Dana-dana untuk menghadapi deforestasi dan emisi dari penggunaan lahan akan disalurkan lewat sebuah usulan “Fasilitas” yang memungkinkan reformasi di sisi permintaan dan menyediakan “bantuan teknis” kepada pemerintah-pemerintah negara yang memiliki hutan yang berminat untuk bekerja sama dengan Inggris untuk “menggali sektor swasta” dalam menghadapi deforestasi.

#### ***Respon awal dari organisasi-organisasi masyarakat sipil***

Sejauh ini LSM-LSM telah menyambut baik komitmen Pemerintah Inggris untuk melawan penyebab-penyebab deforestasi, dan telah mendorong Pemerintah Inggris untuk mempertahankan peran kepemimpinannya dalam upaya global melawan hilangnya hutan dan menghadapi perubahan iklim. Di saat yang sama, berbagai LSM juga menyatakan bahwa usulan Inggris teramat fokus pada sektor swasta dan tidak memberikan perhatian yang

cukup pada penyebab-penyebab kunci tidak langsung dari deforestasi yang terkait dengan penguasaan lahan yang tidak terjamin dan lemahnya tata kelola hutan (meskipun kebutuhan untuk menjernihkan masalah penguasaan lahan secara ringkas disebutkan dalam dokumen Pemerintah Inggris, namun analisis berbasis hak dan analisis sumber penghidupan masih amat kurang). LSM-LSM menyoroti kebutuhan agar strategi Inggris ini diperluas melampaui pelibatan sektor swasta, untuk memungkinkan dilakukannya kerja-kerja yang dibutuhkan dan penting bersama masyarakat hutan dan masyarakat sipil untuk menghadapi deforestasi dalam sebuah kerangka kerja yang inklusif, transparan dan seimbang yang melibatkan baik pemerintah, kalangan usaha dan masyarakat sipil.

Karenanya kalangan LSM menyarankan, agar menjadi efektif dan memberikan hasil yang berkelanjutan, Fasilitas hutan Inggris perlu memastikan sumberdaya-sumberdaya yang ditargetkan untuk menjamin penguasaan lahan masyarakat dan mempromosikan reformasi lintas sektoral serta kerangka kerja regulasi dan pembebasan lahan yang lebih baik untuk dapat sepenuhnya menegakkan hak asasi manusia dan norma-norma lingkungan.

**Untuk informasi resmi lebih jauh tentang kebijakan negara Inggris tentang hutan, pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, silakan lihat:**

<http://www.dfid.gov.uk/What-we-do/Key-Issues/Climate-and-environment/Forests/>

<http://www.dfid.gov.uk/News/Latest-news/2012/Forests-Britain-teams-up-with-business-to-tackle-deforestation/>

<http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/Multi-stake-forestry-prog-ann-rev-2012-1.pdf>

<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.dfid.gov.uk/Global-issues/Emerging-policy/Climate-environment/?tab=4>

<http://www.dfid.gov.uk/Documents/UK%20Fast%20Start%20Finance%20Commitments%20by%20Country%20%202010-11.pdf>

<http://www.colombianembassy.co.uk/en/news/159-the-uk-joins-colombias-efforts-to-tackle-deforestation-and-forest-degradation>

## 7. UNFCCC COP 18 tidak menghasilkan keputusan konkrit tentang REDD+ di Doha dan menunda pembahasan selanjutnya sampai pertengahan tahun 2013

Konferensi Para Pihak Kerangka Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim ke-18 berlangsung di Doha pada bulan Desember 2012, dengan tujuan untuk meletakkan *roadmap* untuk mencapai kesepakatan global yang mengikat perihal pengurangan emisi, yang dijadwalkan akan difinalisasi pada tahun 2015 mendatang.

Isu-isu dan peluang-peluang bagi masyarakat adat di Doha mendapat sorotan dalam sebuah *briefing* yang dipersiapkan oleh Forest Peoples Programme yang dapat diakses di sini:

<http://www.forestpeoples.org/topics/un-framework-convention-climate-change-unfccc/publication/2012/redd-and-indigenous-peoples-an>.

Negosiasi tentang hutan dan mitigasi perubahan iklim, yang ditangani di bawah REDD+, berlangsung dalam 2 jalur, yaitu 1) Kelompok Kerja Ad Hoc Aksi Kerjasama Jangka Panjang (AWG-LCA) yang umumnya menangani isu-isu tentang REDD+ dan pendanaan berbasis hasil, dan 2) Badan Pembantu untuk Nasehat Sains dan Teknologi (SBSTA) yang menangani aspek-aspek metodologis yang berkaitan dengan REDD+, yang utamanya menyediakan panduan untuk masalah-masalah kunci, seperti Sistem Informasi Pengaman, Tingkat Emisi Referensi, Sistem Monitoring Hutan, dan penyebab deforestasi.

Negosiasi di Doha pada saat itu diharapkan dapat mengatasi topik-topik berikut:

- Pengaman berbasis hak dalam sistem-sistem informasi,
- Penetapan nilai (*valorization*) pengetahuan tradisional,
- Dukungan kepada sistem-sistem monitoring adat untuk REDD+,
- Ancaman-ancaman kunci bagi hak-hak masyarakat adat dengan mengacu pada penyebab deforestasi,
- Kebutuhan untuk memperhitungkan nilai non-

karbon dari hutan di dalam pendanaan REDD+.

Namun, tidak ada keputusan diambil mengenai topik-topik di atas. Faktanya, negosiasi-negosiasi REDD+ menemui halangan-halangan yang tidak diperkirakan pada hampir seluruh bidang, terutama tentang isu-isu yang berkaitan dengan verifikasi dan pendanaan.

Negosiasi-negosiasi SBSTA pun berakhir tanpa ada keputusan apapun.

Pembahasan akan dilanjutkan di sepanjang tahun 2013, terutama tentang:

- Modalitas untuk sistem monitoring hutan nasional
- Monitoring pelaporan dan verifikasi
- Penyediaan informasi tentang bagaimana pengaman ditanggapi dan dihormati
- Isu-isu yang berkaitan dengan penyebab deforestasi
- Isu-isu yang berkaitan dengan keuntungan-keuntungan non-karbon<sup>13</sup>

Meskipun demikian, Kelompok Kerja Ad Hoc Aksi Kerjasama Jangka Panjang sepakat untuk meluncurkan program kerja 1 tahun tentang pendanaan REDD+. Konsep-konsep keputusan tentang pengembangan efektivitas keuangan REDD+ dan tentang isu-isu metodologis tentang keuntungan-keuntungan non-karbon akan disusun melalui serangkaian lokakarya, dan akan diadopsi pada COP 19 di Polandia.

Secara keseluruhan, seluruh hasil COP 18 telah mengecewakan masyarakat adat karena tidak adanya keputusan akan masa depan REDD+ (serta dampak-dampak REDD+ terhadap lahan dan mata pencaharian masyarakat adat).

Forest Peoples Programme akan terus mengawasi negosiasi-negosiasi UNFCCC di tahun 2013 dan memberikan nasihat-nasihat strategis dan dukungan bagi mitra-mitra adat, untuk ikut berkontribusi pada upaya konsolidasi komitmen-komitmen untuk hak-hak masyarakat adat dalam aktivitas terkait iklim di dalam hutan.

<sup>13</sup> Keuntungan-keuntungan nonkarbon meliputi konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan mata pencarian, reformasi tata kelola, reformasi penguasaan tanah dan penghormatan atas hak-hak masyarakat adat

## 8. Dapatkan IPBES berpindah dari platform sains ke platform pengetahuan yang beragam?

Sebuah delegasi kecil masyarakat adat dan komunitas lokal menghadiri pertemuan pertama *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services* (IPBES) (Platform Kebijakan-Sains Antar Pemerintah mengenai Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem), yang diselenggarakan bulan kemarin di Bonn, Jerman. Delegasi tersebut menyoroti nilai dan kepentingan pengetahuan adat dan lokal, dan perlunya kemitraan sejati antara pemilik aneka pengetahuan (yang sama 'pakarnya' dalam isu keanekaragaman hayati dengan para ilmuwan) serta IPBES.

IPBES, yang dibentuk di Panama City bulan April 2012, dimaksudkan untuk bertindak sebagai sebuah lembaga antar pemerintah independen untuk mengkaji keadaan keanekaragaman hayati planet ini, ekosistem bumi dan jasa-jasa yang mereka berikan kepada masyarakat. Sedari awal masyarakat adat dan komunitas lokal telah dilibatkan. Di Bonn, para pemerintah dan stakeholder membahas rencana kerja awal untuk IPBES serta aturan-aturan dan prosedur-prosedurnya, termasuk partisipasi organisasi-organisasi non-pemerintah.

Masyarakat adat dan komunitas lokal menekankan bahwa IPBES hanya dapat berhasil jika lembaga ini menjadi sebuah platform pengetahuan beragam yang sejati, yang melampaui ilmu pengetahuan dan merangkul berbagai pemilik keahlian dan pengetahuan berdasarkan azas kesetaraan. Selain itu, masyarakat adat dan para stakeholder lainnya harus diperkuat untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif pada proses yang ada. Silakan baca pernyataan lengkap masyarakat adat dan komunitas lokal untuk IPBES di sini: [http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/02/Statement%20IPLCs%20to%20IPBES1%20Agenda%204\(b\).pdf](http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/02/Statement%20IPLCs%20to%20IPBES1%20Agenda%204(b).pdf)

Untuk mengetahui lebih banyak tentang IPBES silakan kunjungi: <http://www.ipbes.net/about-ipbes.html>

Untuk mengetahui lebih banyak tentang sistem-sistem aneka pengetahuan beragam yang terhubung (*connecting diverse knowledge systems*), lihat: [http://www.dialogueseminars.net/resources/Panama/Reports/Panama-report\\_English\\_small.pdf](http://www.dialogueseminars.net/resources/Panama/Reports/Panama-report_English_small.pdf)

## 9. Publikasi mendatang: Edisi Spesial Lembar Berita ELEktronik FPP tentang Pengaman

Lembar berita elektronik berikutnya dari FPP adalah edisi khusus tentang pengaman, yang akan meneliti informasi terbaru dan [proses tinjauan ulang yang tengah berlangsung di Bank Dunia](#) serta isu-isu pengaman yang lebih luas yang berkaitan dengan pendanaan iklim, standar-standar pihak swasta, dan investasi bank pembangunan regional.

Nantikan Edisi Khusus ini, yang akan diterbitkan dalam bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, dan Indonesia pada bulan April mendatang.

**Informasi lebih lanjut:** <http://www.forestpeoples.org/id/tags/update-and-consolidation-world-bank-safeguard-policies-2010-13>

\*\*\*